



Judul : Komisi IX DPR Bakal Dalam RABN 2022
Tanggal : Minggu, 22 Agustus 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Komisi XI DPR Bakal Dalam RABN 2022

WAKIL Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin M Said menegaskan, DPR bakal membahas lebih dalam soal pemangkasan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bersama Pemerintah dalam persidangan bersama di komisi XI DPR.

Pembahasan ini penting sebelum hal tersebut disahkan oleh Banggar (Badan Anggaran).

“Dalam pembahasan nanti akan kami lihat, apakah pengurangan anggaran PEN tahun depan ini sudah sesuai apa belum. Tentunya kami akan melihat indikator ekonomi dan fakta yang ada di lapangan. Jangan sampai penurunan anggaran menyusahkan rakyat,” kata Muhidin kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Dalam dialog dengan Pemerintah nantinya, DPR akan melihat sejauh mana prediksi pemulihan ekonomi ke depan dan kaitannya dengan perkembangan Covid-19.

DPR akan melihat, apakah penurunan anggaran yang diajukan Menkeu tersebut realistis atau tidak.

Dia menegaskan, pihaknya ingin pemulihan ekonomi dan pengurangan Covid bisa berjalan beriringan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena anggaran yang dibatasi.

“Mereka masih membutuhkan kehadiran Pemerintah melalui bantuan dan stimulus,” imbuhnya.

Muhidin meminta Pemerintah mempersiapkan diri. Menghitung dengan pasti berapa kebutuhan anggaran tahun depan untuk penanganan Covid serta pemulihan ekonomi. Jangan sampai, nantinya tiba-tiba anggaran membengkak, Pemerintah tidak punya dasar hukum yang akhirnya terjadi *refocusing-refocusing* anggaran.

“Kami mau ke depan *refocusing-refocusing* ini berkurang, sehingga Pemerintah harus menghitung secara realistis karena Covid ini sulit diprediksi,” tegas Muhidin.

Seperti diketahui, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 13 Agustus 2021 mencapai Rp 320,35 triliun atau setara dengan 43 persen dari total pagu Rp 744,77 triliun. Untuk anggaran kesehatan, realisasinya mencapai Rp 76,64 triliun atau 34,7 persen dari pagu. Sementara perlindungan sosial, realisasi anggarannya mencapai Rp 97,18 triliun atau 52,1 persen dari pagu. Untuk tahun depan, Kementerian Keuangan menetapkan anggaran PEN sebesar Rp 321 triliun atau lebih rendah dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 744,45 triliun. ■ NOV

“Dalam pembahasan nanti akan kami lihat, apakah pengurangan anggaran PEN tahun depan ini sudah sesuai apa belum. Tentunya kami akan melihat indikator ekonomi dan fakta yang ada di lapangan. Jangan sampai penurunan anggaran menyusahkan rakyat.”